ANALISIS PERBANDINGAN PROGRAM KBANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DENGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI RW 001 KECAMATAN JATISAMPURNA

TAHUN 2020

Yusrita Florentin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Krisnadwipayana

E-mail: Florentinayusrita@gmail.com

Abstract: Comparative Analysis of the Direct Cash Assistance Program (BLT) with the Family Hope Program (PKH) in the Welfare of the Community RW 001 Jatisampurna District. The Family Hope Program is a social protection program that provides cash assistance to poor households (RTM) and for RTM family members are required to carry out the terms and conditions that have been set. Direct Cash Assistance is assistance provided by the government to the community in the form of cash to help them face economic difficulties. The purpose of this study is to find out 1) the comparison of the Direct Cash Assistance Program (BLT) and the Family Hope Program (PKH), 2) What are the supporting and inhibiting factors in increasing the Cash Direct Assistance Program (BLT) and the Family Hope Program (PKH). In this study used a qualitative approach. Data collection techniques in this study are the methods of observation, interviews and documentation. Data analysis is done inductively.

Keywords: Comparison, PKH, BLT, Welfare

Abstrak: Analisis Perbandingan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat RW 001 Kecamatan Jatisampurna. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) perbandingan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara induktif.

Kata Kunci : Perbandingan, PKH, BLT, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, yang sudah selayaknya Indonesia melakukan berbagai cara untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kesejeahteraan masyarakat tersebut, dilakukanlah berbagai pembangunan pada berbagai sektor kehidupan terutama sektor ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui, dimana timbulnya sebuah wabah yang sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi yaitu wabah virus Corona (Covid-19). Dampak wabah virus Covid-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian seluruh Negara termasuk Negara Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Covid-19 sebagai pandemik yang mempengaruhi ekonomi dunia. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemic Covid-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Covid-19 terhadap ekonomi. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, salah satunya adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung. Dalam kebijakan ini, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mengucurkan dana senilai 22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin. Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa besaran dana ini sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu 31% dari total Dana Desa 2020 Rp. 72 triliun. Terkait program BLT, Menteri Abdul menyebutkan bahwa sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima bantuan. Selain itu, BLT juga akan diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exlusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian terdahulu diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dulakukan. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahul sebagai berikut :

1) Hasil Penelitian Harwidiansyah, (2011)

Penelitian Harwidiansyah (2011), berjudul "*Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baju Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*".

2) Hasil Penelitian Rahmayanti, (2017)
Penelitian Rahmayanti (2017), berjudul "*Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rembamelintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rotan Hilir*".

3) Hasil Penelitian Ana Ni'matul Izza, (2019)
Penelitian Ana Ni'matul Izza (2019), berjudul "*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*".

B. Landasan Teori

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini. Landasan teori disini termasuk penelitian terkait, definisi, dan teori yang dimuat dalam buku-buku ataupun makalah ilmiah.

1. Teori Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup bebrbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat dilakukan dalam bentuk program. Dimana program-program tersebut dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Salah satu pasal dari peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemantauan dan analisis program tersebut.Analisis program yang penulis maksud adalah dengan cara melakukan perbandingan dari kedua program tersebut, seperti

1) Bagaimana prosedur pendataannya
2) Kelemahan dan kelebihan dari program
3) Faktor pendukung dan penghambat dari program tersebut

b. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

1) Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2) Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat

Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

3) Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang diatasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

c. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.

a. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.

b. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah.

c. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakan kebijakan yang dibuat mencapai tujuan ayng diharapkan atau tidak.

d. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup sustansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

2. Teori Perbandingan Publik

a. Pengertian Perbandingan Kebijakan Publik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Feldman, perbandingan kebijakan publik adalah suatu metode mempelajari kebijakan publik (meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan "*comparative*". Yaitu membandingkan kebijakan tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di Negara tertentu dengan yang ada di Negara yang lain. Heidenheimer memberi penegasan yang lebih khusus, dengan menyatakan bahwa perbandingan kebijakan publik adalah studi tentang bagaimana, mengapa, dan dampak apa yang ditimbulkan dari adanya tindakan pemerintah dan tidak bertindaknya pemerintah.

b. Tujuan Perbandingan Kebijakan Publik

Paling sedikit ada tiga alasan dan tujuan mengapa kita perlu melakukan studi

perbandingan publik yang ada di antara Negara tertentu dengan Negara lain, atau antara kebijakan yang ada di Negara kita dengan kebijakan di Negara-negara lain, yaitu :

1) Untuk memperoleh gambaran dan pelajaran bagaimana mendesign kebijakan yang baik.
2) Untuk memperolh pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik tentang bagaimana peran kelembagaan-kelembagaan pemerintah dan proses-proses politik (sebagaimana peran yang seharusnya) terutama berkaitan dengan perumusan dan pemecahan masalah-masalah konkrit yang berkembang di masyarakat.
3) Untuk mengkaji berbagai kebijakan yang ada secara lintas nasional.

c. Pendekatan Perbandingan Kebijakan Publik

Studi Perbandingan Kebijakan Publik mengenal beberapa pendekatan. W. Parsons mengemukakan ada lima pendekatan yang umumnya digunakan dalam studi perbandingan kebijakan publik, yaitu :

1) *Socio-Economic Approaches*. Pendekatan ini menganalisis seberapa jauh dampak kebijakan tersebut mempengaruhi faktor-faktor ekonomi sosial.
2) *Party Government Approaches*. Pendekatan ini mengkaji bagaimana kompetisi (persaingan) antara partai politik dan partisan dalam hal mengontrol pemerintah, terutama dalam mengontrol kebijakan publik.
3) *Class Struggle Approaches*. Pendekatan ini menjelaskan perjuangan masing-masing kelompok masyarakat dalam masyarakat yang berkaitan dengan format politik dalam kaitannya dengan kebijakan publik, yang berbeda diantara Negara-negara kapitalis.
4) *Neo-Corporatist Approaches*. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada analisis pengaruh organisasi-organisasi kepentingan (kelompok kepentingan) dalam menentukan kebijakan publik. Dengan kata lain, memfokuskanpada persaingan organisasi-organisasi kepentingan.
5) *Institutionalist Approaches*. Pendekatan ini mengkaji peran Negara dan lembaga-lembaga sosial dalam mendefinisikan maupun menyusun kebijakan publik.

C. Kerangka Pemikiran

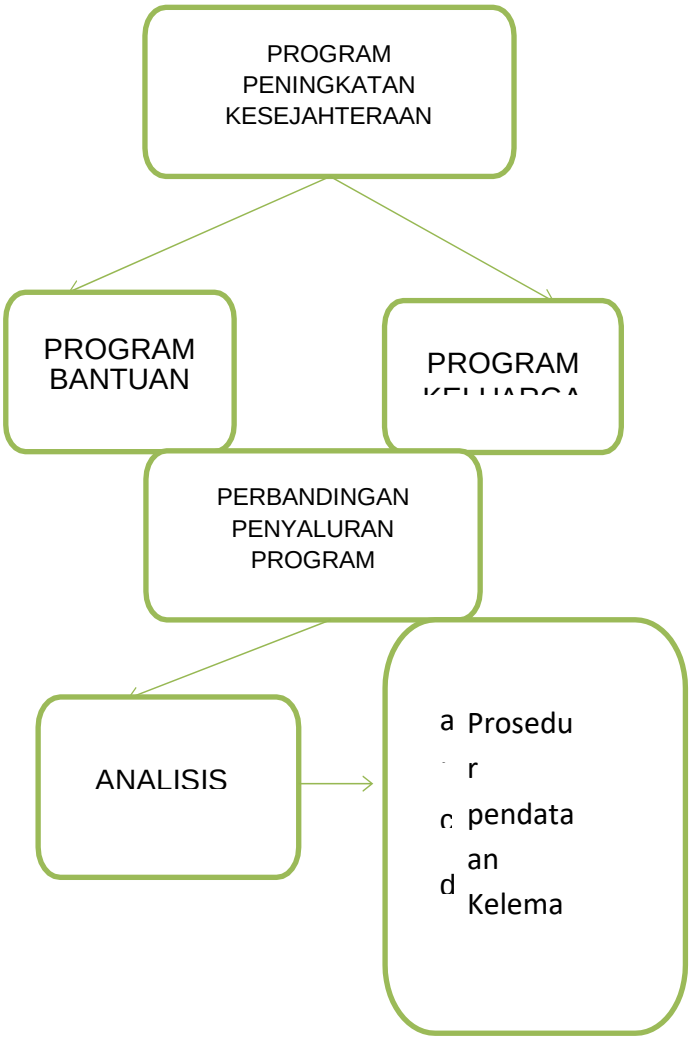

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh data, dimana penelitian kualitatif mengamati fenomena (orang, proses, gejala) dalam lingkungan hidupnya, beinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami tentang dunia mereka.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan RW 001 Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan lebih mudah untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta dianggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai Perbandingan Program Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan.

C. Fenomena Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi fenomena pengamatan menjadi tiga kelompok, pertama prosedur pendataan / persyaratan dalam program, kedua kelemahan dan kelebihan dari kedua program, ketiga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penulis yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya.

F. Pemilihan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, tipe penarikan sampel noprobabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti berdasarkan pertimbangan peneliti dalam unit yang dianggap paling bermanfaat dan representatife. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui perbandingan penerapan Program Bantuan Langsung Tunai dengan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RW 001 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dan menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan orang lain.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan, adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di RW 001 Kecamatan Jatisampurna yang berlokasi di Jl. Raya Kranggan No.1, Telepon: 021 8446564, Email: kec.jatisampurna@bekasikota.go.id.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pendataan Program PKH dan Program BLT Masyarakat di RW 001 Kecamatan Jatisampurna

PKH dan BLT adalah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang dalam target jangka pendeknya bertujuan terlaksananya pemanfaatan fasilitas pendidikan ataupun fasilitas kesehatan peserta PKH dan BLT. Dalam jangka panjang, PKH dan BLT bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

2. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di RW 001 Kecamatan Jatisampurna.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan PKH ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan. meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM, meningkatkan status kesehatan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KPM.

3. Kelemahan dan Kelebihan Program PKH dan BLT di Masyarakat di RW 001 Kecamatan Jatisampurna.

Sebuah program pasti memiliki kelemahan maupun kelebihan. Anggaran. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan anggaran PKH dapat mencapai 16% dari total pengeluaran rumah tangga. Dengan penambahan Rp 20 triliun, jumlah keluarga pra sejahtera di Negara RI diharapkan turun di bawah 9 persen.

4. Faktor pendukung dan penghambat Program PKH dan BLT di Masyarakat di RW 001 Kecamatan Jatisampurna

Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program mempunyai masalah yang masing-masing, sehingga penanganannya pun biasanya dikembalikan kepada masing-masing yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses implementasi program. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pendamping program di setiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program, tentunya juga akan

menemui masalah-masalah sehubungan dengan implementasi program.

5. **Dampak Sosial Ekonomi Pelaksanaan Program PKH dan BLT di Masyarakat di RW 001 Kecamatan Jatisampurna**

Implikasi dalam penelitian ini meneliti bagaimana program PKH dan BLT ini dapat mengentaskan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan program.

C. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai di RW 001 Kecamatan Jatisampurna, belum mensejahterakan penerima manfaat PKH dan BLT. Namun, Program Keluarga Harapan dan BLT di RW 001 Kecamatan Jatisampurna telah mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat. Hal ini sesuai dengan UU yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RW 001 Kecamatan Jatisampurna terkait Perbandingan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mensejahterakan Masyarakat maka dapat disimpulkan:

1. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima PKH. Sedangkan program PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang dalam target jangka pendeknya bertujuan terlaksananya pemanfaatan fasilitas pendidikan ataupun fasilitas kesehatan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan akses bagi orang miskin mendapatkan bantuan dana secara tunai dan memadai untuk membantu kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan. PKH membantu anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan hingga SMA dan memiliki prestasi di sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga penerima manfaat adalah, hendaknya dapat menggunakan bantuan yang diberikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan.
2. Bagi pendamping program, hendaknya lebih berinovasi dalam memberikan materi dan memberikan edukasi kepada KPM agar tidak bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Bagi pemerintah, dalam penentuan KPM hendaknya menggunakan data yang valid sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.
4. Bagi peneliti yang selanjutnya harapannya dapat meneliti lebih luas tentang kedua program tersebut sehingga dapat mengetahui apakah memberikan pengaruh bagi penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Sholichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan*

Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Heidenheimer. 1990. *Comperative Public Policy*. ST. Martin Press: New York.

Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Jakarta: Gramedia.

Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Kartiko, W.R. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengalaman dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Margiono, Bambang. 2003. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. (Jakarta: Inti Ilmu) h 6

Margono, Bambang. 2003. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Inti Ilmu.

Moleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Morissan. 2012. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: An Intridiuction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rosmiati. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. KEMINFO RI.

Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama. Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Khadafi, Rizal. 2017. "*Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Menentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul"* dalam Pemenuhan Kebutuhan: *Journal Of Governance And Public* Volume 4 (hlm.335-336).

Isbandi, R.A. 2005. *"Ilmu Kesejahteraan dan Pekerjaan Sosial"* dalam Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan: Jurnal FISIP UI Press (hlm 11-20).

Rosmiati. 2011. Program Penanggulangan *"Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu"* dalam KEMINFO RI (hlm 18)

Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 *Tentang Keluarga Harapan*.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019.

Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh. 2014. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.

Kementrian Sosial RI. 2016. *Kebijakan Pelaksanaan Prog*

ram

Kelu

arga Harapan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2010. *Program Pengentasan Kemiskinan Tidak Efektif.*

http://www.lipi.go.id/berita/lipi:-program-pengentasan-kemiskinan-tidak-efektif75574

BBC NewsIndonesia. 2020. *Ekonomi Pandemi*. http://www.bbc.com/in

Suharto, Edi. 2010. *Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung.*

www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/PerlindunganSosialTansosmas.pdf

Bangun Napitupulu. 2021. Kediaman Bapak Bangun Napitupulu. 30 Mins.

DRS. Dinar Rizal Badar. 2021. Kantor Kecamatan Jatisampurna, Bekasi. 60 Mins.

Juandi Nababan. 2021. Kediaman Bapak Juandi Nababan. 15 Mins.

Linda Marpaung. 2021. Kediaman Ibu Linda Marpaung. 15 Mins.

Marcel Simanjuntak. 2021. Kediaman Bapak Marcel Simanjuntak. 30 Mins

P. Tambunan. 2021. Kediaman Bapak P. Tambunan. 30 Mins.

Shella Simbolon. 2021. Kediaman Ibu Shella Simbolon. 15 Mins.